

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan kesatuan dari provinsi-provinsi, setiap provinsi memiliki beberapa kabupaten atau kota. Indonesia dimata dunia dianggap sebagai surganya dunia, karena sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki bonus demografi pada tahun 2020-2030, yang diharapkan dengan adanya bonus demografi Indonesia mampu membangun menjadi negara yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki.

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki desa berjumlah 391 desa dan 10 kelurahan. Secara geografis disebelah selatan, Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten berdasarkan informasi yang dihimpun dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu presentase penduduk miskin dan rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda. Pertama, persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada

hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita.

Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 15,62 % pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,98% pada tahun 2017 atau turun sebesar 1,64% selama 5 (lima) tahun terakhir. Kedua, jumlah rumah tangga miskin dalam rentang waktu 2013-2017, dari sebanyak 179.500 jiwa pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebanyak 163.015 jiwa pada tahun 2017 atau turun sebanyak 13.485 jiwa.

Sebagai salah satu kabupaten penerima dana desa di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desanya, salah satunya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemerintah Kabupaten Klaten saat ini sedang gencar mengembangkan desa wisata. Hal ini dilakukan agar semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung sehingga pendapatan desa maupun kabupaten semakin meningkat. Diharapkan dengan adanya desa wisata, perekonomian masyarakat akan semakin membaik dan menurunkan tingkat kemiskinan khususnya masyarakat dipedesaan.

Desa merupakan pemerintahan terkecil disuatu pemerintahan desentralisasi. Pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan angin segar bagi masyarakat desa di Indonesia, terutama masyarakat yang

tinggal dipedesaan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan dengan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Desa menjadi ujung tombak perkembangan suatu pemerintahan. Masyarakat desa mandiri dan sejahtera, pemerintahan akan menjadi kuat disegi ekonomi. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan pemberdayaan masyarakat dengan cara yang tepat dan disokong dengan dana yang mencukupi.

Kabupaten Klaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten memiliki program kerja dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan yaitu peningkatan keberdayaan masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yaitu pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pembangunan bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dapat diartikan pembangunan

yang dilakukan atau digerakkan masyarakat itu sendiri. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Memperdayakan masyarakat dapat diartikan upaya dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan kelatarbelakangan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:74 dalam Eva, 2018).

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, juga dijelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa.

Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian DD dengan berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. DD Pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan untuk pelayanan dasar yang diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan. Penerapan DD yang dilakukan

oleh pemerintah pusat hampir sama dengan pemberian Dana Alokasi Umum di pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal dan kemandirian daerah (Sari, Achyani dan Cahya, 2010 dalam Heri, 2018)

Di samping DD, Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional.

Desa juga memperoleh pendapatan bukan hanya dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melainkan juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada di desa secara mandiri.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 3 menyatakan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah.

Beberapa penelitian mengenai desa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Damar bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Pemoderasi di Kabupaten Wonogiri Perubahan tahun Anggaran 2016 dan 2017. Penelitian Habibah (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa mengingat masih sedikitnya penelitian tentang Pemerintah Desa yang dilakukan di Klaten. Peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek penelitian di daerah yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN**

MASYARAKAT (Studi Empiris: Desa-Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PADes) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BPHR) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa..
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai apakah Bagi Hasil Pajak Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah khususnya dalam belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan dan menambah referensi berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat di Klaten tahun 2017 (Studi Empiris Desa-Desa se-Kabupaten Klaten).

c. Bagi Pemerintah Kabupaten

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memperhitungkan belanja dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak retribusi kepada desa secara proporsional.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan dorongan positif bagi masyarakat dalam membangun dan memberdayakan masyarakat kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode penelitian pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengambilan data, variable penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh oleh penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diharapkan pengguna dan relevan bagi penelitian.